

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1983.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.
- Creswell, John W. *Research Design, Quantitative and Qualitative Approaches*. London: Sage Publication, 2003.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Howard, MN. Ed. *Phipson on Evidence. Fifteenth Edition*. London: Sweet & Maxwell Limited, 2000.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koemolontang, BZ dan T Nasrullah, *Hukum Acara Pidana*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Loqman, Loebby. *Kekuasaan Kehakiman; Tinjauan dari Segi Hukum Acara Pidana*.Jakarta: Datacom, 1990.
- Loudoe, John Z. *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*. Cet. 1. Surabaya: Bina Aksara, 1984.
- Mamudji, Sri *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2007.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods Quantitative and Qualitative Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1997.
- Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana; Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Cet. 1. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kemerdekaan Hakim; Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*. Jakarta: Simplex, 1984.
- _____. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- _____. *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet. 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Prodjodikoro, R Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 12. Bandung: Sumur Bandung, 1985.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- _____. *Biarkan Hukum Mengalir*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Ranoemihardja, R Atang. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Reksodiputro, Mardjono. "Survai dan Riset untuk Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Rasional." Dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 97-115.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Samosir, C Djisman. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Cet. 2. Bandung: Binacipta, 1986.
- Seno Adji, Indriyanto. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Cet. 1 Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2008.
- Seno Adji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Siregar, Bismar. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Semarang: Mandar Maju, 2002.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*. Cet. 1. Bandung: Karya Nusantara, 1982.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Tanusubroto, S. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Bandung: Armico. Cet. 2, 1989.
- Taylor, Alan. *Principles of Evidence*. 2nd Ed. London: Cavendish Publishing Limited, 2000.
- Trusov, Alexei. *An Introduction to The Theory of Evidence*. Moscow: Foreign Languages Publishing House Moscow, tanpa tahun.
- Yudowidagdo Hendrastanto, et al. *Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Van Rhee, CH. Ed. *European Tradition in Civil Procedure*. Oxford: Intersentia Antwerpen, 2005.

Tesis

- Ihsan. "Peranan Kesaksian Ilmiah (*Scientific Testimony*) dalam Penyidikan Suatu Tindak Pidana." Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.

Mudhoffir, Abdil Mughis. "Berebut Kebenaran: Governmentality Pada Kasus Lapindo." Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Munthe, Saut Erwin Hartono A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana." Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2004.

Nuryanto. "Penanganan Akibat Bencana Luapan Lumpur Panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo." Tesis Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.

Artikel

Fienberg, Stephen E. "Ethics and the Expert Witness: Statistic on Trial." *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society) Vol. 160 No. 2* (1997): 321-331.

Hansen, Mark. "Battle of the Expert." *American Bar Association (ABA) Journal Vol. 91* (December 2005): 52.

Herbst, Ludmilla. "Evolving Court Rules on Expert Evidence." *Canadian Property Valuation Vol. 54* (2010): 17.

Kalman, David & David L Eaton. "Scientists in the Courtroom: Basic Pointers for the Expert Scientific Witness." *Environmental Health Perspectives Vol. 102 No. 8* (August, 1994): 668-672.

Kousser, J Morgan. "Are Expert Witnesses Whores? Reflections on Objectivity in Scholarship and Expert Witnessing." *The Public Historian Vol. 6 No. 1* (Winter, 1984): 5-19.

Loftus, Elizabeth F. "Ten Years in the Life of an Expert Witness." *Law and Human Behavior Vol. 10, No. 3* (September 1986): 241-263.

Machmudin, H Dudu Duswara. "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan." *Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251* (October 2006): 51- 66.

Manan, Bagir. "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran." *Varia Peradilan Tahun ke-XXIV No. 285* (Agustus 2009): 5-14.

Morawski, Lech. "Law, Fact and Legal Language." *Law and Philosophy Vol. 18 No. 5* (September 1999): 461-473.

- Prodjohamidjojo, Martiman. "Sumpah atau Janji," *Varia Peradilan Tahun III No. 29* (Februari 1988): 176-178.
- Rostant, Derek. "Reviewing the Role of Expert Witnesses." *CA Magazine* (March 2010): 10.
- Ruse, Michael. "Commentary: The Academic as Expert Witness," *Science, Technology, & Human Values Vol. 11 No. 2* (Spring, 1986): 68-73
- Sargent, John E. "Understanding the Role of a Vocational Expert." *The Practical Litigator* (November 2009): 41-48.
- The Harvard Law Review Associaton. "Expert Legal Testimony," *Harvard Law Review Vol. 97 No. 3* (January 1984): 797-814.
- _____. "Reliable Evaluation of Expert Testimony." *Harvard Law Review Vol. 116 No. 7* (May, 2003): 2142-2163.

Kamus

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*. St.Paul: West Publishing Co., 1990.
- Curzon, LB. *Dictionary of Law. Sixth Edition*. Essex: Pearson Education Limited, 2002.
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary. Eight Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 2004.
- McKechnie, Jean L. Ed. *Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged. Second Edition*. New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster, 1983.
- Statsky, William. *Legal Thesaurus/Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 1985.
- Subekti R dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. 10. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Redaksi Tatanusa. *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2007*. Cet. 1. Jakarta: Tatanusa, 2008.

Internet

- “Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13 Tahun 2008.”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20930/aparat-penegak-hukum-diminta-merujuk-pada-sema-no-13-tahun-2008>. Diunduh 2 Mei 2010.
- “Badan Penanggulangan Semburan Lumpur “ http://www.bpls.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74:bidang-sosial&catid=61:umum-sosial&Itemid=82. Diunduh 2 Juli 2009.
- “Duduk Bersama Bukan Solusi Selama Persyaratan Belum Terpenuhi Kasus Lapindo” <http://hukumonline.com/detail.asp?id=22149&cl=Berita>. Diunduh 2 Juli 2009.
- “Hakim Tak Lagi Dianggap Tahu Seluruh Hukum.”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19643/hakim-tak-lagi-dianggap-tahu-seluruh-hukum->. Diunduh 27 Januari 2010.
- “Jaksa Mempersoalkan Ahli.”
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/04/03175689/jaksa.mempersoalkan.ahli>. Diunduh 4 Mei 2010.
- “JPU Tolak Saksi Ahli Penasihat Hukum Muhammad Iqbal.”
<http://www.kapanlagi.com/h/jpu-tolak-saksi-ahli-penasihat-hukum-muhammad-iqbal.html>. Diunduh 15 Februari 2010.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. Diunduh 16 Februari 2010.
- “Kejaksaan Belum Temukan Kausalitas Pengeboran dan Semburan Lumpur”
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=19719&cl=Berita>. Diunduh 2 Juli 2009.
- “Menakar Harga Saksi Ahli”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>. Diunduh 10 Mei 2010.
- “Mun’im Idris Dijuluki Saksi Bayaran.”
<http://us.detiknews.com/read/2009/12/10/152451/1257911/608/munim-idris-dijuluki-saksi-bayaran>. Diunduh 10 Mei 2010.
- “Saksi Ahli Kubu Rohainil Ditolak Jaksa.”
<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/21/time/140710/idnews/881820/idkanal/10>. Diunduh 2 Mei 2010.

“Sidang Kasus Pak De; Karena Tidak Dibayar, Mun'im.”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4939/font-size1-colorff0000bsidang-kasus-pk-pak-debfontbrkarena-tidak-dibayar-munim-> .
Diunduh 10 Mei 2010.

“Sidang Kasus Puteh, JPU Tolak Keterangan Saksi Ahli.”

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/08/time/113636/idnews/287412/idkanal/10>. Diunduh 15 Februari 2010.

“SP3 Kasus Lapindo Diduga Ada Konspirasi.”

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22862/sp3-kasus-lapindo-diduga-ada-konspirasi->. Diunduh 10 Mei 2010.

“Obyektivitas Ilmuwan atau Pragmatisme Tukang?”

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol5796/obyektivitas-ilmuwan-atau-pragmatisme-tukang>. Diunduh 15 Mei 2010.

“Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP.”

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16916&cl=Berita>. Diunduh 16 Desember 2009.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie). Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981. Disusun oleh M Karjadi dan R Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Cet. 3. Bogor: Politeia, 1997.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____ *Undang-Undang tentang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.

_____ *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004. TLN No. 4358.

_____ *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

_____ *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009. TLN No. 5074.

Peraturan Pemerintah

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHP*. PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983. TLN No. 3258

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Kehakiman tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Rancangan Undang-undang

Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Tahun 2009.

Surat Edaran

Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung tentang Keterangan Ahli Mengenai Tanda Tangan dan Tulisan Sebagai Alat Bukti. SE No. 003/J.A./1984

Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli Dewan Pers. SEMA No. 13 Tahun 2008